



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga,
Kabupaten Bandung Barat**

Skripsi

Oleh

Bima Rahma Putra Pratama

6071901055

Bandung

2024



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga,
Kabupaten Bandung Barat**

Skripsi

Oleh

Bima Rahma Putra Pratama

6071901055

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



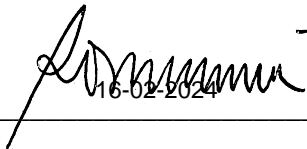
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Bima Rahma Putra Pratama
Nomor Pokok : 6071901055
Judul : Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada (Senin, 22 Januari 2024)
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. : 
16-02-2024

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. : 
16-02-2024

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA. : 
16-02-2024

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bima Rahma Putra Pratama

NPM : 6071901055

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2024



Bima Rahma Putra Pratama

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pendampingdesasule.blogspot.com Internet Source	4%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.unpak.ac.id Internet Source	1%
8	ciwaruga.sideka.id Internet Source	1%

ABSTRAK

Nama : Bima Rahma Putra Pratama
NPM : 6071901055
Judul : Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Kepala Desa Ciwaruga pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 khususnya di Desa Ciwaruga. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi 7 (tujuh) tahap yaitu: (1) Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; (2) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa; (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan; (4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah; (5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; (6) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan (7) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan pada penelitian ini yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dengan meninjau keberhasilan implementasi kebijakan dan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif melalui observasi yang dilakukan di Desa Ciwaruga serta wawancara mendalam dengan 5 (lima) informan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diterapkan, dimana 5 (lima) dari 7 (tujuh) tahapan dikategorikan baik yaitu rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, perubahan pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Pada musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dikategorikan cukup baik. Sedangkan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah termasuk dalam kategori kurang baik.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

ABSTRACT

Nama : Bima Rahma Putra Pratama
NPM : 6071901055
Judul : Implementation of Village Development Activities in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines: Case Study of Ciwaruga Village, West Bandung Regency

This research aims to determine the level of coordination in the implementation of development activities by the Head of Ciwaruga Village, based on Permendagri Number 114 of 2014, especially in Ciwaruga Village. Implementation of village development activities includes 7 (seven) stages, namely: (1) Working meetings with activity implementers; (2) Inspection of the implementation of village infrastructure activities; (3) Changes in the implementation of activities; (4) Management of complaints and resolution of problems; (5) Preparation of reports on the results of activity implementation; (6) Deliberation for the implementation of village activities in the context of accountability for the results of the implementation of activities; and (7) Preservation and utilization of activity results.

The Public Policy Implementation Theory used in this research was put forward by Merilee S. Grindle by reviewing the success of policy implementation and perceptions of whether policy implementation was in accordance with what was determined (design) by referring to policy actions. The method used is a qualitative method with a descriptive case study approach through observations carried out in Ciwaruga Village as well as in-depth interviews with 5 (five) informants and documentation studies.

The results of this research show that all stages of implementation of development activities have been implemented, where 5 (five) of the 7 (seven) stages are categorized as good, namely working meetings with activity implementers, inspection of implementation of village infrastructure activities, changes to activity implementation, preparation of reports on the results of activity implementation, as well as conservation and utilization of activity results. During the deliberation, the implementation of village activities was quite good. Meanwhile, complaint management and problem resolution are included in the poor category.

Keywords: Village Head, Development, Implementation of Development Activities

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur dan kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat melaksanakan skripsi ini sampai selesai dengan judul “Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat.” Walaupun begitu, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini. Penulis terbuka untuk mendengarkan pendapat juga saran dari para pembaca terkait skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Orpha Jane selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D. selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Prodi Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak membantu serta membimbing saya dari awal hingga akhir.
6. Seluruh dosen dari Program Studi Administrasi Publik beserta Staf Administrasi UNPAR, yang sudah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga kelulusan.
7. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta Kepala Desa Ciwaruga dan seluruh staf Pemerintah Desa Ciwaruga yang telah membantu proses penelitian sampai penelitian selesai.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendoakan sekaligus mendukung sejak awal perkuliahan sampai sekarang.

9. Azzahra Syahidah Rabbani yang menjadi saksi perkuliahan penulis di Universitas Katolik Parahyangan serta membentuk dan membantu penulis sejak masa orientasi mahasiswa hingga sekarang.
10. Aeros Wolter dan M. Fachrul Rizki selaku kerabat dekat penulis yang telah mengisi hari-hari selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Teman-teman satu kelas bimbingan yang selalu saling memotivasi sehingga penelitian dapat berjalan sampai selesai. Serta teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritik tentang penelitian ini.

Bandung, 8 Januari 2024

Bima Rahma Putra Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Implementasi Kebijakan	10
2.1.1 Model Implementasi Kebijakan.....	11
2.2 Desa	12
2.3 Pemerintahan Desa.....	14
2.4 Kepala Desa	15
2.5 Pembangunan Desa.....	17
2.6 Profil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.....	19
2.7 Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	31
3.2 Peran Peneliti	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.5 Sumber Data.....	33
3.5.1 Data Primer	33

3.5.2 Data Sekunder.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6.1 Observasi.....	34
3.6.2 Wawancara.....	34
3.6.3 Studi Dokumentasi.....	35
3.7 Analisis Data.....	35
3.8 Pengecekan Keabsahan Data	36
3.8.1 Triangulasi Data.....	38
3.9 Konsep Operasional.....	39
3.9.1 Operasionalisasi Variabel	41
BAB IV OBJEK PENELITIAN	43
4.1 Desa Ciwaruga.....	43
4.2 Kantor Kepala Desa Ciwaruga.....	45
4.3 Struktur Organisasi Desa Ciwaruga.....	47
4.4 Visi dan Misi Kepala Desa Ciwaruga.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	49
5.1 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.....	49
5.1.1 Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan.....	49
5.1.2 Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa.....	53
5.1.3 Perubahan pelaksanaan kegiatan.....	56
5.1.4 Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah	59
5.1.5 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.....	63
5.1.6 Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.....	66
5.1.7 Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.....	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian Desa Ciwaruga	33
Tabel 2 Operasionalisasi Variabel	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 2 Peta Desa Ciwaruga	45
Gambar 3 Peta Kantor Kepala Desa Ciwaruga	46
Gambar 4 Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Ciwaruga	47
Gambar 5 Wawancara Kepala Desa Ciwaruga	50
Gambar 6 Wawancara Kepala Urusan Kesejahteraan	51
Gambar 7 Wawancara Ketua BPD.....	52
Gambar 8 Kotak Pengaduan Masyarakat.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu wilayah yang terdiri dari unit-unit sosial, yang mempunyai identitas dan budaya yang beragam, serta memiliki pemerintahan yang demokratis disebut desa. Meskipun desa merupakan cikal bakal sistem demokrasi di Indonesia yang memiliki otonomi dan kedaulatan penuh, namun pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih belum merata.¹ Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam proses pembangunan di berbagai wilayah, termasuk desa, yang perlu mendapat perhatian agar pembangunan yang merata dan inklusif dapat tercapai di seluruh kawasan.²

Pembangunan desa dilakukan secara bertahap oleh pemerintah desa untuk memastikan pembangunan yang menyeluruh. Sebagai tingkatan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, pemerintahan desa memiliki peran yang krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional yang merata. Pemerintah desa berfungsi sebagai administrator penyelenggara utama

¹ Slamet Suhartono, Ahmad Mahyani, Wiwik Afifah, Dwi Putri Sartika, Risyah Tatamara. *Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency*. Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 121 International Conference on Law Reform (INCLAR 2019).

² Rutli Onnoa, Joorie M. Ruru, Very Y. Londa. *Perencanaan Pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud*. JAP No.106 Vol.VII 2021.

dalam aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah desa, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan dan ketertiban di wilayah desa, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan masyarakat setempat. Keseluruhan hal tersebut menjadi peran kunci untuk memastikan tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak sistem pemerintahan daerah pada tingkat implementasi birokrasi paling rendah di Indonesia dan mempunyai kontak langsung dengan masyarakat lokal yang tinggal di suatu desa.³ Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, lalu perangkat desa yang membantu kepala desa, beserta jajaran stafnya. Pemerintah desa tersebut dipimpin oleh kepala desa, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa mempunyai empat (4) tugas pokok yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

³ Kaysan P'certy Subu Taopan, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju. *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Penfui Timur dan Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang*. Jurnal Hukum Online (JHO) Volume 1, Issue 2 (Juni 2023), PP 185-197.

Peran kepala desa sebagai pemimpin memiliki dampak signifikan terhadap semangat kerja, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi desa dan kinerja perangkat desa lainnya. Dalam konteks pemerintahan desa, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan dari kepala desa, dengan didukung fasilitas yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik pun akan terwujud.⁴ Tugas kepala desa dalam desa sangatlah penting karena menjadi pemimpin desa, yang harus mampu membimbing dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan kegiatan yang dilakukan di desa. Ketika kepala desa berhasil dalam melakukan suatu kegiatan dan mendapat apresiasi lebih dari pemimpin yang lebih tinggi kedudukannya, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa pun meningkat.⁵ Kepala desa diharapkan dapat mendorong pembangunan karena bersentuhan langsung dengan berbagai lapisan masyarakat dan dapat lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat desa. Kewenangan kepala desa juga berpengaruh khususnya pada pembangunan desa yang tidak mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan.

Pembangunan desa hanya dapat tercapai jika pemerintah desa sebagai pengambil keputusan bekerjasama dengan masyarakat desa. Dalam hal ini, seluruh

⁴ Suaib. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mattombang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*. 2018.

⁵ Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Marhadhani, Prihma Sinta Utami. *Peran Kepala Desa terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021.

masyarakat berperan dalam pembangunan desa, tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subyek pembangunan karena pembangunan desa merupakan bagian dari pengembangan berbagai aspek demi kesejahteraan masyarakat desa. Karena desa juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu kabupaten atau kota sangat bergantung pada kemampuan aparatur pemerintah dalam mendorong pembangunan di tingkat desa.

Dasar untuk melaksanakan pembangunan desa dan alur yang dilakukan tertera khusus dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berisi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal desa, dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi,

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁶ Hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan yang merata.

Desa Ciwaruga adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 16.119 jiwa. Desa Ciwaruga sebagai desa peri urban atau berada di wilayah pinggiran Kota Bandung, yang berkembang secara signifikan dan memperoleh dampak dari kegiatan kota sehingga memiliki dinamika bermacam-macam termasuk dalam pembangunannya. Pembangunan di Desa Ciwaruga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Penelitian ini menarik karena dapat memahami sejauh mana pengimplementasian pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari 7 tahapan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Ciwaruga sebagai kawasan peri urban yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk, infrastruktur, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Di tahun 2023, berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bidang pembangunan Desa Ciwaruga menghabiskan dana Rp. 1.029.517.000, - dengan realisasi pembangunan sebesar 33%. Setiap desa, termasuk Desa Ciwaruga, melaksanakan bermacam-macam kegiatan pembangunan yang harus merata. Desa Ciwaruga termasuk ke dalam 62 desa yang masuk kategori desa mandiri di Kabupaten Bandung

⁶ Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI., *Sistem Pembangunan Desa*, h. 3-4.

Barat yakni desa yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan pedesaan menjadi upaya untuk pengembangan kemandirian demi meningkatkan pendapatan, menciptakan kesejahteraan keluarga, dan menghindari masyarakat Desa Ciwaruga dari kemiskinan.

Dalam hal ini, tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sendiri telah tercantum khusus pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang meliputi diantaranya tujuh (7) poin dan ditemukan indikasi bahwasanya terdapat ketidaksesuaian dalam pengoordinasian tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Ciwaruga. Maka dari itu, kepala desa memegang peranan penting dalam menentukan pembangunan desa yang dipimpinnya. Dengan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan meninjau latar belakang di atas maka penulis dapat menyebutkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian dan membatasi penelitian ini, yakni pada pengoordinasian tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Ciwaruga. Penulis secara khusus memfokuskan dan membatasi permasalahan

guna memperjelas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengoordinasian Kepala Desa Ciwaruga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014?”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu “Mengetahui pengoordinasian Kepala Desa Ciwaruga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014”.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pada umumnya maupun administrasi publik pada khususnya, serta dapat menjadi masukan bagi proses penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

2) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini membawa manfaat bagi perkembangan administrasi publik dan analisis selanjutnya dalam memahami bagaimana fungsi birokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi beberapa bagian menjadi susunan bab guna mempermudah penulis untuk melakukan penulisan dan penyusunan penelitian, serta guna mempermudah pembaca agar lebih mudah untuk memahami isi dan struktur dari penelitian yang akan dibagi menjadi 6 bab. Adapun struktur penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, kemudian membahas kepala desa serta Desa Ciwaruga. Lalu, latar belakang tersebut menghasilkan identifikasi dan batasan masalah, dilanjutkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian secara akademis dan teoritis.

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari konsep serta teori yang relevan dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan, local leader, pemerintah desa, kepala desa, pembangunan desa dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa yang

ada di dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dilanjutkan dengan operasionalisasi variabel dan yang terakhir adalah kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik yang dilakukan yaitu wawancara mendalam kepada 5 informan, observasi dengan turun ke lapangan, dan studi dokumentasi melalui dokumen-dokumen mengenai pembangunan desa.

BAB IV Objek Penelitian menjelaskan tentang Desa Ciwaruga, seperti sejarah, letak geografis, penduduk, visi dan misi kepala desa, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Ciwaruga.

BAB V Hasil dan Pembahasan Penelitian yaitu menjelaskan analisis dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dengan datang langsung ke Desa Ciwaruga, dan studi dokumentasi. Bab ini pun akan menjawab rumusan penelitian yang ada di dalam Bab I.

BAB VI Kesimpulan dan Saran yaitu berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian, serta memberikan rekomendasi atau saran untuk Pemerintah Desa Ciwaruga dengan harapan pembangunan yang akan datang akan lebih baik dan merata.